

### **Abstrak**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha dalam tender Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli. Hasil dari penelitian dari Putusan Perkara Nomor: 34/KPPU-L/2009 yaitu bahwa terdapat beberapa fakta-fakta bahwa pelaku usaha telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang memenuhi unsur-unsur persekongkolan, bentuk persekongkolannya adalah persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal. Dalam Putusan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 ditunjukkan bahwa adanya suatu pelanggaran persaingan usaha memiliki Unsur-Unsur yang dapat menentukan bahwa adanya praktik usaha yang tidak sehat, dalam perkara ini menyatakan bahwa terlapor I, terlapor II, terlapor III, terlapor IV, terlapor V, terlapor VI terbukti telah secara sah dan menyakinkan telah melakukan persekongkolan tender. Rumusan masalah dalam penelitian merupakan analisis mengenai kewenangan KPPU dan unsur-unsur dari suatu persekongkolan tender. Jenis Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah Jenis Penelitian Normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka.

Kata Kunci : Kewenangan KPPU, Persekongkolan Tender, Unsur-Unsur Persekongkolan

### **Abstract**

The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has the authority to examine and decide on alleged violations of business competition in tenders under Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices. The results of the study of Case Verdict Number: 34 / KPPU-L / 2009 are that there are several facts that business actors have violated Article 22 of Law Number 5 of 1999 that fulfills elements of conspiracy, the form of conspiracy is vertical collusion and conspiracy horizontal. In Case Decision Number 34 / KPPU-L / 2009 it is shown that a violation of business competition has Elements that can determine that there is an unfair business practice, in this case it is stated that Reported I, Reported II, Reported III, Reported IV, Reported V, Reported VI was proven to have been legally and convinced to have carried out a tender conspiracy. The formulation of the problem in the research is an analysis of the authority of the KPPU and the elements of a tender conspiracy. The type of research that was used in this journal were the Normative Research Type, and the data collection technique used is the literature study.

Keywords: KPPU's Authority, Tender Collusion, Elements of Collusion